

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Adapun fungsi yang diselenggarakan meliputi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA; dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Tahun 2014 Kemen PPPA memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan Kemen PPPA Tahun 2014.

Dengan disusunnya RKT RKT Tahun 2014 Kemen PPPA diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Tahun 2014 Kemen PPPA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	4
A. Visi	
B. Misi	
C. Tujuan	
D. Sasaran	
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Kebijakan	
B. Strategi	
C. Program dan Kegiatan	
LAMPIRAN	
1. Formulir RKT Kementerian PP dan PA	
2. Formulir RKT Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi	
3. Formulir RKT Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum	
4. Formulir RKT Deputi Bidang Perlindungan Perempuan	
5. Formulir RKT Deputi Bidang Perlindungan Anak	
6. Formulir RKT Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	
7. Formulir RKT Sekretariat Kementerian	
8. Formulir RKT Inspektorat	
9. Formulir RKT KPAI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja harus tertata dengan baik.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, sehingga RKT dapat menggambarkan rencana penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Kemen PPPA adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Kemen PPPA dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Kementerian PP dan PA adalah:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Kemen PPPA selama periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, dengan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak, dengan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus;
 - b. Meningkatnya perlindungan anak
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA, dengan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;

- b. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
- c. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak;
- d. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA;
- e. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA;
- f. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:
 - 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
 - 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta
 - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan strategi:
 - 1) Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu;
 - 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP;
 - 3) Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera;
 - 4) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial);
 - 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan

- 6) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.
- c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi:
- 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah;
 - 2) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
 - 3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah;
 - 4) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/kegiatan pembangunan;
 - 5) Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang disharmonis;
 - 6) Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;
 - 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan;
 - 8) Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP;
 - 9) Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP;
 - 10) Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/lembaga/SKPD/ unit layanan terkait KtP; dan
 - 11) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP.

2. Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi:

- 1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan;
 - 2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak;
 - 3) Percepatan kepemilikan akta kelahiran;
 - 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
 - 5) Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
 - 6) Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
 - 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan
 - 8) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.
- b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi:
- 1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 - 3) Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak;
 - 4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;
 - 5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;
 - 6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;
 - 7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa;
 - 8) Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan

- 9) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.
- c. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui strategi:
- 1) Penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya;
 - 2) Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan;
 - 3) Penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SKPD; dan
 - 4) Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian arah kebijakan dan strategi pada ketiga bidang sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada bagian berikut ini:

1. Arah Kebijakan

- a. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, akan diprioritaskan pada:
 - 1) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
 - 2) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemda;
 - 3) Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
 - 4) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di K/L, Pemda, dan Organisasi.

b. Perlindungan Perempuan

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan akan diprioritaskan pada:

- 1) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi;
- 2) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada K/L dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 3) Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 4) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di K/L, Pemda, dan Organisasi.

c. Perlindungan Anak

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskan pada:

- 1) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi;
- 2) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada K/L dan Pemda;
- 3) Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 4) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di K/L, Pemda, dan Organisasi.

2. Strategi

a. Strategi Eksternal

- 1) Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

- 2) Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara K/L dan Pemda, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
- 4) Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan;
- 5) Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

b. Strategi Internal

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kemen PPPA dan kinerja pegawai;
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM Kemen PPPA secara proporsional dan akuntabel;
- 4) Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Kemen PPPA; dan
- 5) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPA dan pegawai.
- 6) Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
- 7) Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja.

C. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2015-2019, maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis)

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dibarengi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang ditandai dengan :
 - 1) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
 - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan;
 - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
 - 3) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan data gender dan anak;
- 2) Pengarusutamaan gender bidang;
- 3) Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur;
- 4) Pengarusutamaan gender bidang IPTEK dengan fokus;
- 5) Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- 6) Pengarusutamaan gender bidang kesehatan;
- 7) Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan;
- 8) Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan;
- 9) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;
- 10) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan;
- 11) Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- 12) Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan;

- 13) Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis;
- 14) Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan;
- 15) Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan;
- 16) Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah;

2. Program Perlindungan Anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuh kembang anak, termasuk pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- b. Meningkatnya perlindungan khusus anak, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 3) Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI);
- 2) Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum;
- 3) Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
- 4) Perlindungan hak sipil anak;
- 5) Perlindungan kekerasan terhadap anak;
- 6) Perlindungan masalah sosial anak;
- 7) Pemenuhan hak kesehatan anak;

- 8) Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur;
 - 9) Pemenuhan hak partisipasi anak;
 - 10) Pemenuhan hak pendidikan anak;
 - 11) Pengembangan kabupaten/kota layak anak;
 - 12) Peningkatan perlindungan anak di daerah.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA yang ditandai dengan:

- a. Persentase (%) rencana program dan anggaran Kemen PPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis;
- b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM;
- c. Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang sesuai kebutuhan dan akuntabel.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kemen PPPA, sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sebagai berikut:

- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
- 2) Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA;
- 3) Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
- 4) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA; dan
- 5) Telaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian : Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi	1. Jumlah kebijakan yang responsive gender di bidang ekonomi	1 Kebijakan
	2. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan yang responsive gender di bidang ekonomi	21 K/L 16 Prov
	3. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi	17 K/L 14 Prov
2. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum	1. Jumlah kebijakan yang responsive gender di bidang polsoskum	6 Kebijakan
	2. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan yang responsive gender di bidang polsoskum	11 K/L 26 Provinsi
	3. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data gender di bidang polsoskum	10 K/L dan 18 Provinsi
3. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan;	1 kebijakan
	2. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan;	8 K/L 11 Provinsi 6 Kab/Kota
	3. Persentase korban kekerasan yang memperoleh pelayanan;	40%
	4. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data gender dan anak di bidang perlindungan hak perempuan	11 K/L 12 Provinsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak	1. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak.	9 K/L 20 Prov
	2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan.	40%
	3. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data perlindungan anak.	6 K/L 17 Prov
5. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak	1. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak;	12 K/L 27 Prov 100 Kab/Kota
	2. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak;	5 K/L 33 Prov 100 Kab/Kota
	3. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).	100 Kab/Kota

Jakarta, November 2013

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Linda Amalia Sari, S.IP

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang	1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	1 Kebijakan
2. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi	K/L
		Provinsi/Kab/Kota
		Organisasi

Jakarta, Januari 2015

Deputi
Bidang PUG Bidang Ekonomi

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Ketenagakerjaan

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Tersedianya kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebij
2. Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang ketenagakerjaan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	1. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan	K/L
	2. Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan	Prov
3. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	Dok
		K/L
		Prov
	2. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	K/L
		Prov
		Organisasi
	3. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	K/L
Prov		
4. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	Kegiatan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L dan Provinsi	Forum (K/L)
		Forum (Prov)
	2. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	Kesepakatan
5. Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	Dokumen

Jakarta, Januari 2015

Asisten Deputi
Gender Dalam Gender Dalam Ketenagakerjaan

Drs. Ninin Nirawaty, MEDPA
NIP. 19540722.197903.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri dan Perdagangan

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1. Tersedianya kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan yang responsif gender	2. Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebij	
	2. Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	3. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	K/L
		4. Jumlah dokumen profil gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	Prov
3. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	5. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	Dok	
		K/L	
		Prov	
	6. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	Organisasi	
		K/L	
		Prov	
	7. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	Organisasi	
K/L			
Prov			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	8. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	Kegiatan
4. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	3. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan di K/L dan Provinsi	Forum (K/L)
		Forum (Prov)
	4. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan yang responsif gender	Kesepakatan
5. Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaa	2. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan yang ditindaklanjuti	Dokumen

Jakarta, Januari 2015

Asisten Deputi
Gender dalam Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil,
Industri dan Perdagangan

Dra. Sunarti, M.Sc
NIP. 19581008.198703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis	3 K/L 3 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis	1 K/L 1 Prov
2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis	3 K/L 5 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Perikanan
dan Kelautan

Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si
NIP. 19671105.199312.2.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi	6 K/L 2 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi	2 K/L 1 Prov
2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi	2 K/L 3 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi	1 K/L 1 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi

Drs. Bambang Kristiono, M. Si
NIP. 19560530.198303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Infrastruktur

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang Infrastruktur	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan bidang Infrastruktur	6 K/L 6 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang Infrastruktur	6 K/L 4 Prov
2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang Infrastruktur	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang Infrastruktur	6 K/L 2 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang Infrastruktur	2 K/L 2 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam Infrastruktur

Dra. Valentina Ginting, MSi.
NIP. 196304291990032001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Politik, Sosial dan Hukum	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Politik, Sosial dan Hukum	6 Kebijakan
2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum	11 K/L dan 26 Provinsi
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bdg Polsoskum yang responsif gender	11 K/L dan 26 Provinsi
3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Politik, Sosial dan Hukum.	1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Politik Sosial dan Hukum.	-
	2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum	10 K/L dan 18 Provinsi
	3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum	10 K/L dan 18 Provinsi

Jakarta, November 2013

Sekretaris Kementerian,

Dra. Sri Danti Anwar, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Hukum

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Hukum	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Hukum	3 Kebij
2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Hukum yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Hukum	3 K/L 5 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan bidang Hukum yang responsif gender	3 K/L 5 Prov
3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Hukum.	1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Hukum.	-
	2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Hukum	4 K/L 2 Prov
	3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Hukum	4 K/L 2 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Hukum

Sri Prihatini Lestari Wijayanti,SH.MH
NIP. 196209071988032001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Kesehatan

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Kesehatan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Kesehatan	-
2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Kesehatan	1 K/L 5 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan Bidang Kesehatan Polsoskum yang responsif gender	1 K/L 5 Prov
3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Kesehatan	1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Kesehatan	-
	2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Kesehatan	1 K/L 6 Prov
	3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Kesehatan	1 K/L 6 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Kesehatan

Ir. Dewi Yuni Muliati
NIP. 19590629.198703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Pendidikan

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Pendidikan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Pendidikan	1 Kebij
2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Pendidikan	1 K/L 6 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan bidang Pendidikan yang responsif gender	1 K/L 6 Prov
3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Pendidikan	1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Pendidikan	-
	2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Pendidikan	1 K/L 3 Prov
	3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Pendidikan	1 K/L 3 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Pendidikan

Dra. Sally Astuty Wardhani, M.Si
NIP. 19540313.198003.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Politik dan Pengambilan Keputusan
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Politik dan Pengambilan Keputusan	1 kebij
2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	2 K/L 6 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yang responsif gender	2 K/L 6 Prov
3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Politik dan Pengambilan Keputusan	1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Politik Sosial dan Hukum.	-
	2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	3 K/L 3 Prov
	3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	3 K/L 3 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Politik dan Pengambilan Keputusan

Drs. A Darsono. M.Si
NIP. 19590613.198003.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang SDA dan Lingkungan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang SDA dan Lingkungan	1 Kebij
2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang SDA dan lingkungan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang SDA dan Lingkungan	4 K/L 4 Prov
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan Bidang SDA dan Lingkungan yang responsif gender	4 K/L 4 Prov
3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang SDA dan Lingkungan	1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang SDA dan Lingkungan.	-
	2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang SDA dan Lingkungan	1 K/L 4 Prov
	3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang SDA dan Lingkungan	1 K/L 4 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Drs. Dermawan, M.Si
NIP. 19630628.198503.1.003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan	1. Jumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	8 K/L 11 Prov 6 Kab/Kota
	2. Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan	40 %
2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan hak perempuan dan informasi gender	1. Jumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan dan memanfaatkan data perlindungan hak perempuan dan informasi gender	11 K/L 12 Prov

Jakarta, November 2013

Deputi

Bidang Perlindungan Perempuan

Dra. Luly Altruismaty, M.Sc
NIP. 19570622.198103.2.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Informasi Gender
 Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Penerapan Sistem Data Gender	1. Jumlah kebijakan penyusunan data dan informasi gender	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penyusunan data dan informasi gender	14 Provinsi 5 K/L
	3. Tersedianya sistem data gender	1 Sistem
4) Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data gender	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pengelola data gender	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data dan menerapkan kebijakan data dan informasi gender	5 provinsi 5 K/L
	3. Data dan Informasi Gender	2 Publikasi (Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Statistik Gender)

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Informasi Gender

Ir. Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan	1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	6 K/L 6 Provinsi
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	3 K/L 3 Provinsi
	4. Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan	40 %
2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	5. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pengembangan data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	4 Provinsi
	6. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	2 Provinsi

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Rohika Kurniadi Sari, SH,M,Si
NIP. 19640415.199003.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan
 Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan	1. Jumlah kebijakan penanganan masalah sosial perempuan	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan	1 K/L 4 Provinsi 3 Kab/Kota
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan penanganan masalah sosial perempuan	1 K/L 1 Provinsi 1 Kota
2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data terkait dengan masalah sosial perempuan	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data masalah sosial perempuan	1 K/L 2 Provinsi
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data masalah sosial perempuan	1 Provinsi

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
 Penanganan Masalah Sosial Perempuan

Hasan, SH
 NIP. 19600708.198503.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Perlindungan Korban Perdagangan Orang
 Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	5 K/L 5 Provinsi 5 Kab/Kota
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	5 K/L 5 Provinsi 5 Kab/Kota
2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	5 K/L 3 Provinsi
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	5 K/L 3 Provinsi

Jakarta, November 2013

Plt. Asisten Deputi
Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Ir. Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1 kebijakan
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1 K/L 2 Provinsi
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1 K/L 2 Provinsi
2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan	1 K/L 2 Provinsi
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan tenaga kerja perempuan	1 K/L 2 Provinsi

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan peran Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.	1. Jumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan perlindungan anak.	9 K/L 20 Prov
	2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	40%
Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data perlindungan anak	1. Jumlah Kementerian/Lembaga , Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan data perlindungan anak.	6 K/L 17 Prov

Jakarta, November 2013
Plt. Deputi
Bidang Perlindungan Anak

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	1. Jumlah Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	2 Kebij
	2. Sistem Peradilan Pidana Anak	3 K/L
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	2 K/L 5 Prov
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum	1 K/L 2 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Ali Khasan, SH. M.Si
NIP. 19630906.199303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus	1. Jumlah Pedoman Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus	1 Kebj
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang PA yang berkebutuhan khusus	2 K/L 3 Prov
	3. Jumlah Pemda dan K/L yang difasilitasi penyusunan data anak berkebutuhan khusus	1 K/L 4 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Dra. Sri Winarsih
NIP. 19560111.198303.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	1. Jumlah Pedoman Hak Sipil Anak	1 Kebj
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Hak Sipil Anak	1 K/L 4 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Data Hak Sipil Anak	1 K/L 4 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Sipil Anak

Rudy Purboyo, S. H
NIP. 19551111.198402.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada Anak	1. Jumlah Pedoman Penghapusan Kekerasan Pada Anak	1 Kebij
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Penghapusan Kekerasan Pada Anak	2 K/L 2 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Penyusunan Data Anak Korban kekerasan	1 K/L 3 Prov
	4. Pelaksanaan survey prevalensi KTA	1 Dokumen

Jakarta, November 2013
Asisten Deputi
Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM
NIP. 19660324.199103.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial	1. Jumlah Pedoman Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial	1 Kebij
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial	2 K/L 6 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Data Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial	2 K/L 4 Prov

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Masalah Sosial Anak

Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si
NIP. 19630509.198811.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan bidang tumbuh kembang.	1. Jumlah kebijakan tumbuh kembang anak	-
	2. Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang Mengembangkan kebijakan/program/kebijakan tumbuh kembang anak	12 K/L 27 prov 100 kab/kota
	3. Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak	5 K/L 33 prov 100 kab/kota
	4. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	100 kab/kota

Jakarta, Desember 2013
Deputi
Bidang Tumbuh Kembang Anak

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	5 K/L 23 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1 K/L 2 Prov
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak kesehatan anak	1 K/L 19 Prov
	5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data pemenuhan hak kesehatan anak	1 K/L 2 Prov

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Laksmi Indiarti. S. Sos
NIP. 19531220.197903.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	1. Jumlah kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	8 K/L 29 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	1 K/L 1 Prov
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	8 K/L 12 Prov
	5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	1 K/L 1 Prov

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur

Ir. Nurti Mukti Wibawati
NIP. 19580411.198303.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak	1. Jumlah kebijakan Partisipasi Anak	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Partisipasi Anak	1 K/L 25 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan Partisipasi Anak	1 K/L 1 Prov
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data Partisipasi Anak	3 K/L 17 Prov
	5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data Partisipasi Anak	- K/L 6 Prov

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

Usman Basuni, SE, MA, MPHR
NIP. 19630520.198803.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	6 K/L 24 Prov
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1 K/L 3 Prov
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak pendidikan anak	3 K/L 31 Prov
	5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data pemenuhan hak pendidikan anak	1 K/L 3 Prov

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Dra. Niken Kiswandari, M.Si
NIP. 671017.198703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pengembangan Kota Layak Anak

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak	1. Jumlah kebijakan Pengembangan KLA	-
	2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Pengembangan KLA	24 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota
	3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan Pengembangan KLA	8 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data KLA	2 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota
	5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data KLA	2 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota
	6. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan model KLA	100 Kab/Kota

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Deputi Pengembangan Kota Layak Anak

Drs. M.A. Budhy Prabowo, M Si
NIP. 19620921.198903.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Sekretaris Kementerian

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya dukungan administrasi	1. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%
	2. Persentase tahapan reformasi birokrasi yang diselesaikan	80%
	3. Persentase pengembangan SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%
	4. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	90%
	5. Persentase layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
	6. Persentase layanan sarana dan prasarana yang diberikan sesuai standar	80%
	7. Persentase layanan administrasi penatausahaan yang diselesaikan tepat waktu	80%
	8. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	9. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan secara online (e-procurement)	90%
	10. Persentase layanan bantuan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian PP dan PA yang diselesaikan tepat waktu	90%
	11. Persentase layanan liputan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian PP dan PA yang dilaksanakan	100%
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja	1. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%
	2. Persentase laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
	3. Persentase laporan Barang Milik Negara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	4. Tersedianya sarana dan prasarana gedung	100%

Jakarta, November 2013

Sekretaris Kementerian

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Humas

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terbentuknya citra positif KPP dan PA di forum nasional dan internasional	1. Persentase Penyediaan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan manajemen	100%
	2. Persentase Layanan hubungan masyarakat yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100%
	3. Persentase Bantuan hukum yang tepat waktu, sesuai kebutuhan dan akuntabel	100%
	4. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

Jakarta, November 2013
Kepala Biro Hukum dan Humas

Ratna Susianawati, SH, MH
NIP. 19720227.199703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Biro Perencanaan

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya rencana program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu , terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)	1. Persentase Rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)	100%
	2. Jumlah laporan rencana dan evaluasi kinerja organisasi	4 Dokumen
	3. Persentase Kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral	100%
	4. Laporan bahan pimpinan dan monev pelaksanaan kinerja program di lingkup KPP dan PA	5 Dokumen
	5. Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan Anak	1 Dokumen

Jakarta, November 2013

Kepala Biro Perencanaan

Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc
NIP. 19620824.198702.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Biro Umum

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Layanan prasarana dan sarana barang dan jasa, administrasi keuangan, penata usahaan pimpinan dan pengembangan SDM sesuai kebutuhan, tepat waktu dan akuntabel	1. Persentase pengembangan SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%
	2. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	90%
	3. Persentase layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
	4. Persentase layanan sarana dan prasarana yang diberikan sesuaistandar	80%
	5. Persentase layanan administrasi penatausahaan yang diselesaikan tepat waktu	80%
	6. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan secara online (e-procurement)	90%
	7. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%
	8. Persentase laporan Barang Milik Negara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	9. Tersedianya sarana dan prasarana gedung	100%

Jakarta, November 2013

Kepala Biro Umum

Ir. Siti Khadijah Nasution, MM
NIP. 19570119.198303.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat KPAI

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di provinsi	9 Prov
	2. Jumlah DPRD yang menerima sosialisasi tentang hasil telaah perundangan-undangan, kebijakan, dan Implementasi perlindungan anak	9 Prov
	3. Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak	1 Dok
	4. Persentase (%) layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel	100%

Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,

Linda Amalia Sari, S.IP

Kepala Sekretariat KPAI

Retno Adji Prasetyaju, S.H
NIP. 19581002.198703.2.001